

KONTESTASI WACANA KEAGAMAAN PASCA-PANDEMI: REINTERPRETASI IDEOLOGI DAN OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA DISRUPSI DIGITAL

RELIGIOUS DISCOURSE IN CRISIS: NAVIGATING CONSERVATISM, MODERATION, AND PROGRESSIVISM IN THE DIGITAL ERA

DOI: 10.47281/fas.v6i1.235

Muflih Naufal Irfan¹, Indo Santalia², Tabhan Syamsu Rijal³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.^{1,2}

Universitas Bosowa Makassar, Indonesia.³

E-mail: muflihnaufal08@gmail.com¹

E-mail: indosantalia@uin-alauddin.ac.id²

E-mail: samsu.rijal@universitas-bosowa.ac.id³

Abstract

The COVID-19 pandemic has not only become a health crisis but has also shaken the social, economic, and ideological structures, including in the religious domain. In Indonesia, as a country with diverse religious adherents, this pandemic has sparked competition among religious discourses that reflect various ideologies, from conservative to progressive. This article analyzes the dynamics of this contestation by examining the responses of religious figures and institutions to pandemic-related issues, such as vaccination, online worship, and the relationship between religion and state. The research highlights how social media has become an arena for competing religious discourses and how this influences the understanding and practice of religious life within society. Although the pandemic has subsided, the ideological residue and disruption of religious authority persist and even shape a new normal of digital religious life in Indonesia.

Keywords: COVID-19; Ideology; Pandemic; Religious Discourse

Abstrak

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan tetapi juga mengguncang struktur sosial, ekonomi, dan ideologis, termasuk dalam ranah keagamaan. Di Indonesia, sebagai negara dengan penganut agama yang beragam, pandemi ini telah memicu persaingan di antara diskursus keagamaan yang mencerminkan berbagai ideologi, dari konservatif hingga progresif. Artikel ini menganalisis dinamika kontestasi tersebut dengan memeriksa respons tokoh dan lembaga keagamaan terhadap isu-isu pandemi, seperti vaksinasi, ibadah daring, dan hubungan antara agama dan negara. Penelitian ini menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi arena untuk persaingan diskursus keagamaan dan bagaimana hal ini memengaruhi pemahaman serta praktik kehidupan beragama dalam masyarakat. Meskipun pandemi telah mereda, residu ideologis, disrupsi otoritas keagamaan masih berlangsung dan bahkan membentuk normal baru kehidupan keagamaan digital di Indonesia.

Kata Kunci: COVID-19; Ideologi; Pandemi; Wacana Agama

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi krisis multidimensi yang meliputi sektor negara, masyarakat, ekonomi, teknologi, demografi, dan kesehatan, di mana dampaknya akan bertahan dan terasa sampai bertahun-tahun. Marciniak et al., (2022) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pandemi telah mempengaruhi berbagai bidang kegiatan sosial, budaya,

perawatan, kesehatan, demografi, ekonomi, pendidikan, ilmiah, dan teknologi. Pandemi menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan dalam kebijakan pada situasi krisis. Mulai dari ketidakjelasan informasi tentang virus, ketidakpastian berakhirnya penularan, dilema prioritas kesehatan dan ekonomi, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, merupakan beberapa persoalan global yang terus mencuat (Alfirdaus & Yuwono, 2020).

Pandemi ini menjadi peristiwa global yang memaksa semua aspek kehidupan untuk beradaptasi, termasuk dalam praktik dan pemikiran keagamaan. Di Indonesia, agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Situasi krisis yang ditimbulkan oleh pandemi membuka ruang baru bagi munculnya perdebatan dan kontestasi wacana keagamaan, yang memperlihatkan keberagaman ideologi dan pemahaman atas teks-teks suci serta relasi antara agama dan negara.

Indonesia mengalami krisis multifaset akibat mewabahnya COVID-19. Irresidensi sosial dan kebingungan umat muncul ketika berbagai tafsiran agama berbenturan, baik dalam konteks interpretasi takdir, legitimasi kesehatan, maupun otoritas agama formal. Dampak sosial ini menunjukkan bagaimana perbedaan otoritas agama bisa mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat terhadap pandemi dan bencana, mencerminkan irresidensi sosial dan kebingungan umat (Tessa & Sudjatmiko, 2021).

Memasuki fase pascapandemi, masyarakat tidak kembali sepenuhnya ke praktik keagamaan prapandemi. Perubahan seperti normalisasi ibadah daring, tumbuhnya figur otoritas keagamaan digital, serta meningkatnya ketergantungan umat pada informasi dari media sosial menjadi realitas baru. Maka, dinamika kontestasi wacana keagamaan perlu diperluas cakupannya, tidak hanya sebagai respons terhadap krisis pandemi, melainkan sebagai refleksi perubahan struktur otoritas, praktik keberagamaan, dan strategi dakwah pada masa setelahnya (Lihat Aunul & Handoko (2022) dan Ichwan et al., (2024)).

Berangkat dari masalah sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk dan dinamika kontestasi wacana keagamaan yang muncul selama dan pasca pandemi, serta bagaimana respons berbagai aktor keagamaan menunjukkan adanya ketegangan antara wacana konservatif, moderat, dan progresif. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan teori wacana Foucault dan konsep ideologi keagamaan sebagaimana dikembangkan oleh Storey untuk membedah dinamika kontestasi keagamaan selama pandemi. Pendekatan ini memungkinkan penulis melihat wacana keagamaan bukan sekadar komunikasi verbal, tetapi sebagai praktik kekuasaan, makna, dan legitimasi.

John Storey, dalam Hartanto (2016), menyebut ideologi sebagai bahasa sistematis yang diwujudkan dalam praktik kelompok, termasuk keagamaan atau religius. Maka, ketika dikaitkan dengan agama, ideologi keagamaan dipahami sebagai alat legitimasi keyakinan keagamaan, digunakan baik untuk penguatan spiritual ataupun ideologis. Adapun bentuk ideologi keagamaan, menurut Saparudin (2017), terdiri dari dua jenis yaitu diseminatif (pasif) dan konstruktif (aktif). Pada bentuk yang pertama, ideologi terbangun secara pasif misalnya tempat pendidikan agama hanya mentransmisikan nilai agama pada santri tanpa aktivitas ideologi aktif. Sedangkan pada bentuk yang kedua, ideologi terbangun secara aktif misalnya lembaga menyusun kurikulum agar santri tidak hanya paham doktrin, tetapi aktif dalam mereproduksi visi ideologis kelompoknya.

Dalam konteks Indonesia, kontestasi ideologi keagamaan berlangsung dalam tiga spektrum tafsir sebagaimana dijelaskan oleh Hannan & Syarif (2022) serta Fuaddin (2022), yaitu Konservatif yang mempertahankan interpretasi tekstual dan tradisional (misalnya,

Kontestasi Wacana Keagamaan Pasca-Pandemi: Reinterpretasi Ideologi Dan Otoritas Keagamaan Di Era Disrupsi Digital

narasi takdir dan penolakan terhadap intervensi medis), Moderat yang menjembatani antara yang kaku dan fleksibel (misalnya, pendekatan adaptif berbasis maslahat dan ijtihad kontekstual), dan Progresif yang mendukung pluralisme agama dan dialog transformatif (misalnya, penekanan pada etika sosial, keadilan kesehatan, dan interpretasi transformatif).

Wacana keagamaan dipahami sebagai produksi makna yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dalam konteks sosial tertentu. Michel Foucault (2013), dalam karyanya *Archaeology of Knowledge*, mendefinisikan wacana (*discourse*) bukan sekadar bahasa atau pernyataan, tetapi sebagai sistem yang memproduksi objek pengetahuan. Pada karyanya yang lain, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Foucault (1977), menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui institusi dan praktik diskursif, bukan hanya melalui represi fisik. Adapun dalam *The History of Sexuality*, Foucault (1978), menyebutkan bahwa individu harus memahami wacana sebagai serangkaian segmen yang terputus-putus di mana fungsi taktiknya tidak seragam maupun stabil. Ini adalah istilah yang diberikan kepada berbagai elemen diskursif yang dapat dimainkan dalam berbagai strategi. Dengan demikian, dalam pendekatan Foucaultian, wacana bukan hanya bentuk komunikasi, tetapi juga sarana kekuasaan yang membentuk dan membatasi kebenaran. Kontestasi wacana mengacu pada perebutan otoritas dan legitimasi makna antara aktor-aktor sosial yang membawa ideologi berbeda. Pendekatan Foucault melihat wacana sebagai 'kekuasaan yang mendisiplinkan', dan konflik wacana terjadi ketika aktor berusaha mendominasi legitimasi kebenaran.

Studi ini menunjukkan integrasi pendekatan teori wacana Foucauldian dengan konteks disrupsi digital pascapandemi dalam ranah keagamaan di Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya memotret respons keagamaan dari sudut normatif atau kelembagaan semata, studi ini menawarkan kerangka analisis kritis yang mengaitkan dinamika tafsir ideologis keagamaan dengan perubahan pola otoritas di ruang digital. Dengan memadukan analisis terhadap konten media sosial, respons ormas Islam, serta transformasi dakwah algoritmik, tulisan ini memperlihatkan bahwa kontestasi wacana keagamaan tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh logika algoritma, viralitas, dan mediasi digital yang belum banyak disentuh dalam literatur studi Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana peneliti melakukan penelitian dengan merujuk pada literatur-literatur yang terkait dengan wacana keagamaan di Indonesia pada masa krisis, yaitu pada masa pandemi COVID-19, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan komplet dalam menganalisis terkait masalah tersebut. Literatur yang dirujuk memiliki kriteria berindeks scopus atau sinta dengan tujuan menguatkan kualitas substansi pembahasan. Peneliti menggunakan tiga teknik analisis yaitu analisis isi (*content analysis*), *discourse analysis* Foucauldian, dan komparatif kualitatif. Analisis isi pada penelitian ini terefleksi pada menganalisis data berupa fatwa, pernyataan institusi, artikel, dan konten media sosial. Peneliti mengaji makna, wacana, dan ideologi yang muncul dari sumber-sumber tersebut, bukan sekadar deskriptif tetapi interpretatif. Analisis berfokus pada narasi, tafsir, dan wacana keagamaan yang mengindikasikan adanya pendekatan tematik dan konseptual dalam membaca data teks. Adapun *discourse analysis* Foucauldian terefleksi dari kerangka teoretis yang peneliti gunakan adalah pendekatan Foucault terkait wacana, kekuasaan, dan otoritas. Sedangkan analisis komparatif kualitatif terefleksi pada saat peneliti menyusun tabel pembeda antara dua Ormas terbesar dalam merespons pandemi COVID-19 yaitu Muhammadiyah dan NU.

Kontestasi Wacana Keagamaan Pasca-Pandemi: Reinterpretasi Ideologi Dan Otoritas Keagamaan Di Era Disrupsi Digital

Muflih Naufal Irfan, Indo Santalia, Tabhan Syamsu Rijal

Dalam kerangka analisis wacana Foucauldian, penelitian ini menelaah bagaimana konstruksi wacana keagamaan dibentuk oleh relasi kuasa, institusi, dan otoritas naratif di tengah krisis pandemi. Analisis dilakukan dengan menyoroti tiga aspek utama: (1) siapa aktor atau institusi penghasil wacana (otoritas formal vs digital), (2) bagaimana bentuk representasi wacana keagamaan (teks fatwa, konten dakwah daring, unggahan media sosial), dan (3) apa implikasi kuasa dari wacana tersebut (hegemonik, resistif, atau transformasional). Peneliti mengidentifikasi segmen diskursif dari sumber-sumber tersebut, lalu mengkaji relasinya terhadap struktur kekuasaan (power/knowledge) dan proses subyektivasi publik Muslim Indonesia. Tahapan analisis mencakup pembacaan kritis atas narasi, identifikasi oposisi biner (seperti iman vs sains, tradisi vs teknologi), serta pelacakan bagaimana institusi atau individu berupaya memonopoli kebenaran agama melalui strategi diskursif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Dan Reinterpretasi Wacana Keagamaan

Respons umat Islam di Indonesia terhadap pandemi COVID-19 dapat dipetakan ke dalam tiga spektrum yaitu konservatif, moderat, dan progresif. Konservatif (reaksi regresif) ditandai dengan reaksi emosional negatif yang berlebihan, seperti kepanikan, penimbunan barang, penyebaran informasi tanpa verifikasi, hingga penolakan terhadap kebijakan ibadah dari rumah. Sikap ini menunjukkan resistensi terhadap perubahan dan cenderung bersandar pada fatalisme teologis, contohnya seperti keengganan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang konstruktif terhadap COVID-19, termasuk menolak anjuran untuk beribadah di rumah sebagaimana diserukan oleh pemerintah dan para pemuka agama, kerap didasarkan pada keyakinan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah, sehingga tidak perlu merasa takut terhadap virus Corona karena satu-satunya yang layak ditakuti hanyalah Allah semata. Moderat (reaksi adaptif) menggambarkan fase transisi, di mana individu mulai menerima realitas, mengelola informasi dan emosi secara lebih rasional, serta mulai memilah tindakan secara sadar. Sikap ini mencerminkan proses internalisasi nilai dan peningkatan literasi, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Adapun Progresif (reaksi transformatif) menunjukkan bentuk respons yang paling produktif dan konstruktif. Individu dalam spektrum ini menunjukkan empati, solidaritas sosial, inovasi, dan kemampuan adaptasi tinggi. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi secara positif bagi masyarakat dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai keislaman yang kontekstual (Hidayah, 2020).

Secara keseluruhan, ketiga spektrum ini merefleksikan dinamika psikososial dan keagamaan umat Islam Indonesia dalam merespons pandemi, dari yang bersifat reaktif dan emosional hingga yang adaptif dan transformatif. Respons ini tidak hanya mencerminkan keberagaman sikap keagamaan, tetapi juga kapasitas komunitas untuk belajar dan tumbuh dalam krisis.

Di Indonesia, wacana keagamaan publik secara formal dibentuk oleh sejumlah lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, sosial, dan politik. Lembaga tersebut layaknya Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Organisasi Keagamaan Besar (Ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini telah diatur dalam Perpres No. 83 tahun 2015 tentang fungsi Kemenag, Keppres No. 69 tahun 2000 tentang peran MUI, dan UU Ormas yang semula tertuang dalam UU No. 17 tahun 2013, namun diubah menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 tentang kegiatan Ormas.

Majelis Ulama Indonesia (2020), sebagai lembaga yang menaungi ormas-ormas Islam di Indonesia, secara responsif menerbitkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada 16 Maret

2020 mengenai tata cara pelaksanaan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Fatwa ini mencakup sembilan poin penting. Pertama, menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan penyakit merupakan kewajiban agama karena termasuk dalam tujuan utama syariat (*al-Dharūriyat al-Khams*). Kedua, orang yang positif COVID-19 diwajibkan untuk mengisolasi diri agar tidak menularkan virus ke orang lain. Ketiga, bagi yang sehat atau belum diketahui terpapar, ada ketentuan berbeda tergantung tingkat risiko wilayah: jika berada di zona berisiko tinggi, mereka diperbolehkan tidak salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah, serta tidak mengikuti salat berjamaah, tarawih, atau salat Id di tempat umum; sedangkan di wilayah berisiko rendah, ibadah tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan seperti membawa sajadah pribadi dan tidak bersalaman. Keempat, jika penyebaran COVID-19 tidak terkendali dan membahayakan jiwa, salat Jumat ditiadakan dan diganti dengan salat zuhur di rumah. Kelima, bila situasi terkendali, salat Jumat tetap wajib dilaksanakan. Keenam, fatwa ini dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menangani aspek keagamaan selama pandemi dan umat Islam diwajibkan mengikutinya. Ketujuh, jenazah pasien COVID-19 harus diproses sesuai protokol medis dan syariat, oleh pihak yang berwenang. Kedelapan, umat Islam dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, taubat, dzikir, doa khusus (qunut nazilah dan doa penolak bala), serta memperbanyak sedekah. Kesembilan, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kepanikan atau merugikan publik, seperti menimbun sembako atau masker, dinyatakan haram.

Sejalan dengan MUI, dalam merespons pandemi COVID-19, Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia sama-sama memainkan peran penting dalam membentuk wacana keagamaan publik. Meski keduanya memiliki kesamaan dalam niat menjaga keselamatan umat, pendekatan dan narasi keagamaannya memiliki nuansa yang berbeda. Berikut tabel penjabaran persamaan dan perbedaan respons dua Ormas Islam terbesar ini, setelah penulis melakukan analisis dan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu.

Tabel Persamaan Muhammadiyah dan NU dalam Merespons Pandemi COVID-19

Persamaan	Keterangan
<i>Mengedepankan Keselamatan Jiwa</i>	Keduanya menekankan bahwa menjaga keselamatan jiwa adalah prioritas dalam Islam, sehingga ibadah yang berpotensi menimbulkan penularan dapat ditunda atau diganti (Hasyim, 2023).
<i>Mendukung Kebijakan Pemerintah dan Sains Medis</i>	Baik Muhammadiyah maupun NU mendukung protokol kesehatan, pembatasan ibadah berjamaah, serta vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar keagamaan dan ilmiah (Arrahmah et al., 2022).
<i>Menerbitkan Fatwa/Panduan Ibadah Khusus Pandemi</i>	Keduanya mengeluarkan panduan khusus terkait salat berjamaah, salat Jumat, pemulasaraan jenazah COVID-19, hingga pelaksanaan Ramadan dan Idulfitri selama pandemi (Kusumaningtyas, 2021).
<i>Mengembangkan Filantropi Sosial</i>	Masing-masing ormas memperkuat gerakan sosialnya: Muhammadiyah melalui <i>Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC)</i> , dan NU melalui <i>Satgas NU</i>

Peduli COVID-19 (Ichsan, 2020) serta (Bastomi & Kasdi, 2022).

Terlepas dari persamaan di atas, kedua Ormas terbesar di Indonesia ini juga memiliki perbedaan dalam merespons pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang fundamental dalam pendekatan teologis keduanya, sumber otoritatif yang digunakan, dan narasi keagamaan yang berbeda. Pada aspek pendekatan teologis, Muhammadiyah bersifat rasional dan purifikatif dengan berlandaskan *tajdid* (pembaruan), sedangkan NU bersifat tradisional dan kontekstual, berbasis fikih mazhab (Syafi'i) dan kearifan lokal (Darmawan, 2018). Pada aspek sumber otoritatifnya, Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga otoritatif ijtihad Muhammadiyah, sedangkan NU merujuk pada Lembaga Bahtsul Masail dan fatwa kolektif para kiai pesantren (Mujahidin, 2016). Adapun pada aspek narasi keagamaan, Muhammadiyah lebih menekankan logika rasional serta dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, sedangkan NU lebih menekankan ijtihad kolektif berbasis qaul ulama dan tradisi pesantren (Ali & Bunganegara, 2023).

Berdasarkan tiga perbedaan utama di atas, lahirlah reinterpretasi yang berbeda dari Muhammadiyah dan NU dalam merespons pandemi COVID-19 ini. Penulis memberikan contoh konkret dalam bentuk tabel sebagaimana berikut.

Tabel Perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam Merespons Pandemi COVID-19

Aspek	Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama
<i>Fatwa Penangguhan Salat Jumat dan Jamaah</i> (Syafaruddin et al., 2023)	Melalui <i>Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.O/H/2020</i> , Muhammadiyah dengan tegas menghentikan sementara salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah bagi daerah dengan risiko tinggi penularan. Pendekatan ini didasarkan pada maqashid syariah dan prinsip darurat syar'i.	NU juga membolehkan tidak menjalankan salat Jumat di daerah rawan penularan. Namun, melalui Bahtsul Masail PBNU, NU lebih menekankan pada pembacaan kaul ulama klasik, dengan memberi penjelasan bahwa pengganti salat Jumat adalah salat zuhur <i>hanya jika benar-benar darurat</i> dan harus dikonsultasikan kepada ulama setempat. Lebih banyak ruang dibiarkan untuk kontekstualisasi lokal.
<i>Sikap terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19</i> (Rohmansyah & Hidayat, 2024)	MCCC Muhammadiyah memberi panduan bahwa jika sulit dilakukan pemulasaraan lengkap, maka mandi jenazah bisa diganti dengan tayamum atau bahkan cukup disalati dari jauh, demi keselamatan petugas. Panduan mereka lebih ringkas dan berorientasi pada efisiensi serta keamanan.	NU cenderung lebih ketat dalam pemulasaraan jenazah. Melalui LBM NU, mereka menyampaikan bahwa mandi wajib jenazah tetap harus diusahakan jika memungkinkan, dan petugas harus menggunakan APD lengkap. NU menekankan pentingnya tetap menjaga kehormatan jenazah meskipun dalam kondisi darurat.

<i>Tradisi Keagamaan dan Ziarah</i> (Syafaruddin et al., 2023)	Melarang seluruh kegiatan ziarah, tahlilan, dan tradisi yang melibatkan kerumunan selama pandemi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip tauhid dan purifikasi ajaran agama dari tradisi yang tidak berdasar dalil syar'i.	NU tidak secara tegas melarang ziarah atau tahlilan, melainkan menganjurkan agar kegiatan dilakukan secara terbatas, atau diganti dengan ziarah secara virtual atau doa dari rumah. Ini menunjukkan akomodasi terhadap tradisi keagamaan masyarakat.
<i>Penyampaian Dakwah dan Vaksinasi</i> (Arrahmah et al., 2022)	Mendorong dakwah digital yang berbasis konten edukatif dan ilmiah, serta menggunakan data kesehatan dan fatwa keagamaan sebagai basis edukasi publik.	Selain dakwah digital, banyak kiai NU tetap hadir secara langsung di komunitas akar rumput, terutama di pedesaan, sambil menyampaikan pesan agama dan kesehatan dengan pendekatan kultural.

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan respons kedua Ormas di atas, keduanya cenderung memiliki perhatian yang sama dalam menjaga keselamatan umat pada masa krisis pandemi COVID-19. Namun, pendekatan teologis, sumber otoritatif, dan narasi keagamaan yang digunakan berbeda sehingga melahirkan respons yang beragam. Kedua Ormas tersebut sejatinya bersifat progresif dalam mereinterpretasi wacana keagamaan pada masa krisis, namun pada realitasnya masih terdapat beberapa kelompok yang memberikan respons konservatif dan moderat terhadap wacana keagamaan pada masa krisis ini.

Media Sosial Sebagai Arena Kontestasi Ideologi Keagamaan

Kontestasi ideologi keagamaan merupakan bagian dari dinamika kehidupan beragama di masyarakat modern yang semakin plural, terbuka, dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sosial-politik (Nata, 2019). Bila melihat pada masa pandemi COVID-19, terjadi kontestasi antara pihak yang mendorong penyesuaian ibadah berbasis ilmu kesehatan dan fatwa ulama, dengan pihak yang tetap memaksakan ibadah berjamaah tanpa pembatasan atas dasar "iman" atau tafsir literal terhadap takdir ilahi.

Keberagaman ekspresi keagamaan di Indonesia terbentuk dari sejarah panjang pluralisme dan politik identitas pasca-reformasi. Institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki otoritas dalam pembentukan wacana keagamaan publik. Namun, keberadaan kelompok-kelompok non-mainstream dan individu berpengaruh di media sosial telah mendisrupsi otoritas lama dan memperluas spektrum kontestasi.

Institusi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU dalam studi ini bukan hanya aktor sosial, tetapi juga *discursive formation* dalam makna Foucauldian, yaitu struktur yang memproduksi, mengatur, dan membatasi jenis pernyataan keagamaan apa yang sah untuk beredar di ruang publik. Melalui fatwa, maklumat, dan panduan ibadah, ketiga institusi ini menciptakan seperangkat aturan diskursif yang mendisiplinkan tubuh umat: bagaimana mereka harus beribadah, bersikap terhadap pandemi, hingga bersosialisasi. Teks fatwa bukan sekadar hukum, tetapi wacana normatif yang beroperasi sebagai bentuk kuasa simbolik dan simbolik-material. Dalam konteks pascapandemi, kekuasaan wacana ini

ditantang oleh munculnya aktor non-institusional (influencer, komunitas daring), yang memproduksi kontra-wacana dan menandai pergeseran sumber legitimasi keagamaan.

Pandemi mempercepat digitalisasi dakwah. Media sosial menjadi arena di mana otoritas keagamaan lama diuji dan dipertanyakan. Influencer agama, ustaz YouTube, serta komunitas daring menawarkan narasi alternatif yang kadang bertentangan dengan lembaga formal. Pertarungan wacana di ruang digital memperlihatkan dinamika baru: siapa yang paling mampu memengaruhi opini publik bukanlah yang paling berilmu, melainkan yang paling menguasai media. Hal ini dibuktikan dalam studi Randani et al., (2022), bahwa kontestasi otoritas agama memuncak di ruang digital, terjadi “war” argumentatif antar pengikut tokoh di platform-platform media sosial.

Studi lainnya oleh Agusta & Laugu (2020), mengungkap bahwa hoaks dan fatwa radikal mendapatkan *traction* cepat di Instagram karena formatnya mudah disebarkan, sekalipun keilmuan aslinya lemah. Adapun studi oleh Chandra et al., (2021), menganalisis ratusan ribu tweet #CoronaJihad dan #tablighijamaatvirus, menunjukkan bagaimana sinyal dasar bukan ilmu agama, melainkan framing emosional dan ritme penyebaran oleh akun-akun yang mengoptimalkan algoritma media sosial via *hashtag* dan *retweet* massal.

Seluruh riset di atas konsisten menunjukkan bahwa di era media sosial, terutama semasa pandemi COVID-19, yang paling mampu memengaruhi opini publik bukan yang paling berilmu, melainkan yang paling mahir memanfaatkan platform: mampu memilih format yang viral, menyesuaikan narasi dengan algoritma, dan memanfaatkan interaksi sosial. Kontestasi ideologi keagamaan (moderasi vs konservatif, stigma agama terhadap pandemi) terjadi dalam kerangka viralisasi konten, bukan kualitas ilmu.

Dalam lanskap wacana keagamaan digital, dapat ditemukan oposisi biner yang memainkan peran strategis dalam mempertahankan atau mendekonstruksi otoritas. Misalnya, dikotomi iman vs sains, ulama tradisional vs influencer dakwah, serta ritual konvensional vs ibadah daring menjadi penanda diskursif yang berfungsi untuk mengukuhkan dominasi makna tertentu. Dalam kerangka Foucauldian, oposisi-oposisi ini bukan sekadar narasi ideologis, tetapi mekanisme kekuasaan yang mendisiplinkan cara umat berpikir, merasa, dan bertindak secara religius. Wacana konservatif sering mengaktifkan posisi “iman murni” sebagai pembenaran atas penolakan intervensi medis atau ibadah daring, sementara wacana progresif menggunakan legitimasi ilmiah dan nilai maslahat untuk memperluas tafsir syariat. Perebutan narasi terjadi melalui strategi oposisi biner inilah, di mana setiap kutub berupaya membingkai dirinya sebagai representasi kebenaran tunggal.

Implikasi Sosial Dan Keagamaan

Kontestasi wacana selama pandemi membawa dampak besar yakni meningkatnya kebingungan umat dalam menentukan sikap keagamaan, potensi polarisasi di tingkat komunitas akibat perbedaan tafsir. Sebagaimana diungkapkan oleh Karim (2021), bahwa pandemi memperuncing polarisasi di kalangan umat Islam. Sejalan dengan itu, transformasi dakwah ke ranah digital mengubah karakter ruang publik keagamaan. Media sosial memfasilitasi narasi eksklusif dan politisasi agama, yang malah memperlebar polarisasi komunitas (Murniati, 2025).

Di sisi lain, kontestasi wacana selama pandemi, juga membuka peluang untuk dialog inter-mazhab dan pematangan literasi keagamaan di tengah krisis. Pandemi mendorong integrasi wacana sains dan agama, memungkinkan dialog substantif antarparadigma serta mematangkan literasi keagamaan (Zainuri & Amal, 2023). Maka, perlu ada upaya dari negara

dan institusi keagamaan untuk membangun komunikasi publik berbasis moderasi, data sains, dan nilai kemanusiaan.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi Literasi Keagamaan Digital atau peningkatan literasi menjadi urgensi agar umat mampu menyaring informasi agama di media sosial. Studi oleh Sabila & Mutrofin (2023), menunjukkan bahwa digitalisasi platform, misalnya TikTok, efektif meningkatkan kualitas literasi Islam audiens, namun juga memunculkan kebutuhan untuk memilah konten valid dari sekadar viral. Sehingga dengan arus informasi cepat di media sosial, keterampilan evaluatif dan pemantauan fakta menjadi sangat penting, tak terkecuali pada masa krisis seperti pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, yang berdampak pada meningkatnya interaksi dengan media sosial. Keterampilan literasi keagamaan digital ini menjadi urgen untuk menghindari konflik terutama imbas termakan konten viral namun tidak valid.

Upaya lainnya yaitu Kohesi Sosial atau kontestasi tafsir ibadah dan otoritas agama dapat memicu polarisasi. Namun, sinergi moderat berdampak positif pada kohesi lintas komunitas. Studi lapangan di Desa Puntukdoro oleh Maksun et al., (2024), menunjukkan bahwa kegiatan moderasi beragama, seperti festival toleransi, program keagamaan inklusif di sekolah, dan kampanye media sosial, berhasil meningkatkan inklusivitas, partisipasi lintas agama, dan opini publik yang positif. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan meredakan potensi konflik polarisasi. Studi ini menjadi demonstrasi nyata bahwa sinergi moderat mampu memperkuat kohesi komunitas, selaras dengan upaya kohesi sosial yang dimaksudkan sebelumnya.

Adapun upaya lainnya dalam membangun komunikasi publik berbasis moderasi, data sains, dan nilai kemanusiaan adalah Negosiasi Otentisitas yaitu perlunya dialog antara ulama formal dan tokoh digital untuk menyatukan otoritas naratif agama di ruang publik. Rohmah et al., (2024), menyatakan otoritas keagamaan digital (seperti influencer dakwah) telah muncul dan mempengaruhi publik, hingga terkadang melemahkan otoritas ulama tradisional. Moderasi beragama digital menuntut adanya negosiasi otentisitas, yaitu kolaborasi dan dialog antara ulama formal dan tokoh digital, dapat menyatukan otoritas naratif agama yang menterjemahkan nilai moderasi, kemanusiaan, dan data-sains dalam komunikasi publik. Sebuah studi oleh Alfani & Anwar (2024), menyoroti bagaimana influencer dakwah di media sosial membentuk otoritas keagamaan baru. Ini sejalan dengan gagasan negosiasi otentisitas antara ulama tradisional dan digital. Studi ini konsisten menunjukkan bagaimana interaksi sistematis antara kedua pihak tersebut memperkuat legitimasi dan efektivitas pesan dakwah di era digital.

Bila peneliti coba merefleksikan, meskipun respons keagamaan dari aktor-aktor institusional seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU menunjukkan upaya progresif dalam menyelaraskan antara agama, sains, dan kepentingan kemanusiaan, tidak dapat diabaikan bahwa peran mereka masih menghadapi tantangan serius dalam konteks komunikasi publik yang luas dan responsif.

Kekuatan institusi keagamaan terletak pada basis teologis yang kuat, struktur organisasi yang mapan, serta kapasitas filantropi yang nyata di tengah krisis. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan dalam menjangkau publik secara luas, khususnya dalam memanfaatkan medium digital secara maksimal dan relevan. Respons formal yang berbasis fatwa atau maklumat seringkali tidak cukup responsif terhadap dinamika cepat, emosional, dan *segmented* di ruang media sosial.

Lebih dari itu, sebagian besar strategi komunikasi mereka cenderung bersifat *top-down*, birokratis, dan kerap kehilangan kedekatan dengan realitas psikososial umat yang

terfragmentasi. Akibatnya, meskipun posisi ormas moderat telah jelas secara teologis dan normatif, namun dalam konteks praktik sosial, narasi konservatif dan populistik tetap mendominasi diskursus digital, terutama di kalangan masyarakat yang secara digital melek tetapi secara literasi keagamaan masih rendah.

Refleksi ini menegaskan bahwa keberhasilan ideologis bukan hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh format, medium, dan kecepatan distribusinya. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi aktor-aktor keagamaan bukan hanya pada produksi fatwa atau kampanye filantropi, tetapi juga pada reformasi strategi komunikasi dakwah digital yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual.

Wacana Keagamaan Pasca-Pandemi

Meskipun institusi seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU kembali menjalankan fungsi normal, otoritas mereka terus ditantang oleh narasi keagamaan digital dari influencer dan komunitas daring pascapandemi. Penelitian oleh Syatar et al., (2024) yang mengamati tiga akun instagram di tahun 2024 pascapandemi; @nuonline_id (NU), @lensamu (Muhammadiyah), dan @indonesiabertauhidofficial (Salafi Independen). Hasilnya, mereka menemukan bahwa akun Salafi memiliki pengaruh paling signifikan dan lebih banyak pengikut. Ini menunjukkan masih adanya otoritas tradisional digital seperti NU/Muhammadiyah, namun torpedo narasi keagamaan lebih kuat datang dari influencer digital berbasis Salafi. Hal ini menggambarkan adanya disrupsi otoritas keagamaan formal pascapandemi oleh pengaruh-pengaruh influencer digital.

Di sisi lain, pandemi juga meninggalkan persistensi polarisasi ideologis. Residual ideologi keagamaan yang menguat di masa pandemi (konservatif vs moderat vs progresif) tetap berpengaruh dalam isu-isu pascapandemi seperti vaksinasi anak, pendidikan daring, dan isu politik-keagamaan. Salah satu contoh konkretnya, pada bidang pendidikan, Ramang, (2023) menyebutkan bahwa pascapandemi banyak mahasiswa yang enggan kembali ke tatap muka, cenderung tetap memilih metode daring karena merasa lebih nyaman secara individual dan ideologis. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan agama sekarang menghadapi ideologisasi metode dan gaya belajar, di mana kebiasaan daring mempertahankan polarisasi struktural.

Memasuki masa pascapandemi ini juga, dakwah visual-algoritmik mengalami peningkatan drastis. Dominasi TikTok, Reels, dan konten video pendek pascapandemi menunjukkan bahwa algoritma visual telah menjadi “madrasah baru” yang sangat mempengaruhi narasi keagamaan publik. TikTok misalnya, Khairunnisa et al., (2024) menemukan bahwa 38,6% remaja Surabaya menggunakan TikTok untuk konten pendidikan dan dakwah, serta 81,8% di antaranya tertarik pada video dakwah pendek. Selain itu, 61,4% menonton konten dakwah secara rutin, dan sebagian besar setuju bahwa format singkat kreatif tersebut menguatkan nilai moral dan perilaku sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana algoritma TikTok memfasilitasi penyebaran dakwah massal secara cepat dan persuasif.

Dalam konteks disrupsi digital, relasi kuasa-wacana tidak lagi bersumber dari kualifikasi keilmuan formal, melainkan dari kapasitas adaptif terhadap algoritma platform digital. Hal ini menggeser struktur legitimasi otoritas keagamaan: siapa yang paling menguasai *format viral*, mampu memproduksi konten pendek yang resonan dengan psikologi audiens, justru yang paling didengar. Pendekatan Foucauldian melihat ini sebagai transformasi mekanisme *disciplinary power*, di mana algoritma menjadi perangkat tak kasatmata yang mengarahkan distribusi narasi dan visibilitas tokoh keagamaan. Dengan kata

lain, ruang digital bukan hanya arena pertarungan ide, melainkan struktur kekuasaan itu sendiri, diatur oleh logika teknologis yang mendefinisikan “kebenaran” berdasarkan jangkauan dan impresi, bukan otoritas ilmu atau dalil. Disinilah kontestasi wacana keagamaan hari ini berlangsung secara penuh.

Wacana keagamaan lainnya pascapandemi yang banyak menyorot publik adalah moderasi dan literasi keagamaan digital sebagai strategi pascapandemi. Hal ini terlihat pada inisiatif-inisiatif seperti sertifikasi dai digital, program dakwah sehat, dan kanal moderat seperti podcast keislaman menjadi respons penting untuk mencegah radikalisme dan populisme keagamaan di dunia maya. Pada program sertifikasi imam, dai, dan khatib misalnya, program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi dakwah digital, mulai dari penyusunan materi, teknik presentasi *online*, dan adaptasi konten sesuai karakteristik platform (Nurkholis & Noor, 2025). Program ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah, ormas Islam, dan komunitas yang mengindikasikan upaya sistematis untuk menjaga kualitas dan menanamkan moderasi agama secara *online*.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi momen penting yang menyingkap dinamika kontestasi wacana keagamaan di Indonesia. Keberagaman respons dan ideologi menunjukkan bahwa agama tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan terus berinteraksi dengan realitas sosial. Perlu pendekatan lintas disiplin dan keberanian institusi keagamaan untuk menavigasi tantangan ideologis demi menjaga kohesi sosial dan relevansi agama dalam menghadapi krisis global.

Pandemi mengungkap pergeseran otoritas agama dari institusi ke ranah digital. Spektrum respons keagamaan mencerminkan ketegangan ideologis konservatif-moderat-progresif, dengan ruang dialog yang penting untuk menjaga integritas sosial. Adapun rekomendasi praktis yang dapat dilakukan yaitu menguatkan literasi agama digital untuk mencegah narasi hoaks/pro-konspirasi, menguatkan koordinasi antara otoritas agama formal dan influencer digital pro-ilmu, serta publikasi jejak keberhasilan moderasi agama selama pandemi demi mendukung rekonstruksi wacana religius pasca-krisis.

Adapun pada masa pascapandemi, kebutuhan akan moderasi keagamaan yang berbasis teknologi menjadi lebih mendesak. Negara dan ormas Islam perlu memformulasi kebijakan baru untuk dakwah digital yang tidak hanya menyasar isi, tetapi juga mempelajari mekanisme distribusi konten, kolaborasi lintas platform, dan penguatan ekosistem algoritma keagamaan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, A. S., & Laugu, N. (2020). Fresh Informasi Keagamaan Melalui Media Instagram Dalam Menanggapi Covid-19 Di Indonesia. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 11(2), 88–99. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss2.art1>
- Alfani, M., & Anwar, L. (2024). Kontekstualisasi Hadis Dalam Era Digital: Retorika Dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah Di Media Sosial. *Universum*, 18(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.30762/universum.v18i2.2611>
- Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 206–216. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>
- Ali, M., & Bunganegara, M. H. (2023). Kajian Hadis di Lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(2), 188–199.
- Arrahmah, F. K., Bimantara, A., Hidayat, I. A., Listiani, E. M., Aziz, M. A., & Huda, S. (2022).

- Metode Dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 91–106.
- Aunul, S., & Handoko, D. (2022). Digital religion: How digital immigrants access religious content during pandemic. *Islamic Communication Journal*, 7(1 SE-Articles), 77–88. <https://doi.org/10.21580/icj.2022.7.1.10088>
- Bastomi, H., & Kasdi, A. (2022). Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi Peran Satgas Nu Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 7 (1), 29–52.
- Chandra, M., Reddy, M., Sehgal, S., Gupta, S., Buduru, A. B., & Kumaraguru, P. (2021). “A Virus Has No Religion”: Analyzing Islamophobia on Twitter During the COVID-19 Outbreak. *Proceedings of the 32nd ACM Conference on Hypertext and Social Media*, 67–77.
- Darmawan, C. (2018). Relevansi Pemikiran Teologi Islam Muhammadiyah Dengan Pemikiran Pembaharuannya. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 14, 19–35. <https://doi.org/10.19109/medinate.v14i2.3074>
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage. Fraser, J.(2005). *Lessons from the Independent Private Power Experience in Pakistan*.
- Foucault, M. (1978). The history of sexuality: an introduction Vintage Books. New York.
- Foucault, M. (2013). *Archaeology of knowledge*. routledge.
- Fuaddin, A. (2022). Pluralisme Agama, Tafsir Al-Qur'an dan Kontestasi Ideologis Pendakwah Online di Indonesia. *SUHUF*, 15(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.750>
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2022). Konservatisme vs. Moderatisme: Kontestasi Pemikiran Keagamaan Kontemporer di Kalangan Ormas Islam Lokal di Madura, Indonesia. *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 10.
- Hartanto, R. (2016). Mengkaji Relasi Agama dan Ideologi. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 1. <https://doi.org/10.22515/dinika.v1i1.6>
- Hasyim, S. (2023). Prioritizing Life over Religion in Indonesia's Covid-19 Fatwas: The Fatwas of NU, Muhammadiyah, and MUI. *Studia Islamika*, 30(3).
- Hidayah, N. (2020). Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Wabah Corona di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 423–438. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15365>
- Ichsan, M. (2020). Islamic philanthropy and Muhammadiyah's contribution to the Covid-19 control in indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 16(1), 114–130.
- Ichwan, M. N., Amin, F., Khusairi, A., & Andrian, B. (2024). Digitalization and the shifting religious literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0. *Islamic Communication Journal*, 9(2 SE-Articles), 245–266. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>
- Indonesia, M. U. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI Pusat. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-mui-tentang-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>
- Karim, S. (2021). Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Peta Politik 2024. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 12–12. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/5648/3763>
- Khairunnisa, R. A., Rahmadani, N. A., Michiofani, I. A., Pramita, F. D., & Putri, A. D. (2024). Pengaruh Video Dakwah Pada Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Remaja di Era 5.0. *IJM: Indonesian Journal of Multidisiplinary*, 152–167.
- Kusumaningtyas, A. D. (2021). Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam terkait Social Distancing pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi atas Sikap Resmi NU, Muhammadiyah, dan MUI). *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2(1), 21–47.
- Maksum, M., Priamono, G. H., Mansyuri, A. H., & Arifa'i, M. A. (2024). Moderasi Beragama Sebagai Katalisator Untuk Kohesi Sosial Di Desa Puntukdoro Magetan: Religious Kontestasi Wacana Keagamaan Pasca-Pandemi: Reinterpretasi Ideologi Dan Otoritas Keagamaan Di Era Disrupsi Digital

- Moderation as a Catalyst for Social Cohesion in Puntukdoro Village Magetan. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2 SE-Articles), 91–101. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6441>
- Marciniak, S., Boguski, J., & Załoga, W. (2022). Multidimensionality of the Pandemic Crisis and Its Consequences. *European Research Studies*, 25(4), 74–87.
- Mujahidin, S. (2016). *Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)* [UIN Antasari Banjarmasin]. https://idr.uin-antasari.ac.id/4550/?utm_source=chatgpt.com
- Murniati, M. (2025). Ruang Publik dan Wacana Agama: Dinamika Dakwah di Tengah Polarisasi Sosial. *Khazanah: Journal of Religious and Social Scientific*, 1(1 SE-Articles), 26–33. <https://doi.org/10.70742/khazanah.v1i1.260>
- Nata, A. (2019). Respons intelektual muslim Indonesia terhadap gagasan islamisasi ilmu pengetahuan dan relevansinya terhadap tantangan era milenial. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2 SE-Artikel), 199–221. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v8i2.2250>
- Nurkholis, N., & Noor, M. (2025). Optimizing Da'wah in the Digital Era Through the Imam, Dai, and Khatib Certification Program in Bandar Lampung City. *West Science Islamic Studies*, 3(01 SE-Articles), 68–74. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1629>
- Ramang, R. (2023). Challenges of teaching islamic religious education during post-pandemic covid-19 at the State Islamic University of Datokarama Palu, Indonesia. *Journal of Advanced Education and Sciences*, 3(1 SE-Articles), 50–54. <https://dzarc.com/education/article/view/259>
- Randani, Y. N. F., Jalimah Zulfah Latuconsina, & Mukhsin Achmad. (2022). Kontestasi Otoritas Agama (Studi Kasus: Fenomena War Di Facebook Dan Instagram Dan Implikasinya Terhadap Internal Umat Islam). *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 1008–1023. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art13>
- Rohmah, F., Jannah, S. R., & Wazis, K. (2024). Komunikasi Dakwah Digital dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 24(2 SE-Articles), 130–148. <https://doi.org/10.15575/anida.v24i2.40168>
- Rohmansyah, R., & Hidayat, Y. (2024). Efforts To Prevent The Spread Of Covid-19 According To The Doctrine Of Muhammadiyah In Indonesia: Hadith Studies. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(2), 398–416.
- Sabila, A. T., & Mutrofin, M. (2023). Urgensi Peningkatan Kualitas Literasi Keislaman Melalui Digitalisasi (Studi Pada Followers Tiktok Da'i Muda Husain Basyaiban. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7335>
- Saparudin. (2017). *Ideologi Keagamaan dalam Pendidikan: Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok*.
- Syafaruddin, S., Nasution, H. B., & Tanjung, D. (2023). Philosophy of Fatwa Muhammadiyah and Nahdatul Ulama Against Changes in Worship Activities Due to Covid 19. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 27(1), 11–22.
- Syatar, A., Hasyim, B., Saputra, A. T., & Ilham, M. (2024). Religious Authority in the Age of Instagram: Unveiling the Contestation of Islamic Discourses. *Jurnal Adabiyah*, 24(2), 182–201.
- Tessa, A., & Sudjatmiko, I. G. (2021). Peran Dan Kontestasi Patron Agama Dalam Penguatan Resiliensi Komunitas Rawan Bencana Ganda (Double Disaster) Di Tengah Pandemi Covid-19. *Penamas*, 34(1), 1–22.
- Zainuri, A., & Amal, M. K. (2023). *The Idea of Cross-Religious Dialogue in the Time of the Covid-19 Pandemic A . Introduction world . In a sense , the population of Indonesia is Muslim , even contact with local culture and the development of government . SAW did not oblige . 4 Because the*. 17(1), 139–166. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.423.1>